

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes Sektor Pariwisata Studi Kasus Pada BUMDes Badean

Dwi Indriani Fidiastutik Wijaya *¹

Fais Syah ²

Irwania Deby Dhea Puspita ³

Mudhi Nuriyati ⁵

Yashinta Putri Anggraini ⁵

Najwa Alifa ⁶

Vanisa Nia Nur Ramadhani ⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Jember, Indonesia

*e-mail: d42221651@student.polije.ac.id¹, d42221627@student.polije.ac.id²,
d42221510@student.polije.ac.id³

Abstrak

Artikel ini membahas kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan pada BUMDes Badean, sebuah Badan Usaha Milik Desa yang bergerak di sektor pariwisata di Desa Badean, Kabupaten Jember. Permasalahan utama yang dihadapi adalah keterbatasan pemahaman pengurus terhadap prinsip akuntansi dasar dan kurang optimalnya pemanfaatan aplikasi keuangan yang tersedia. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder dari dokumen laporan keuangan desa. Kegiatan pendampingan dilaksanakan secara bertahap, meliputi pengenalan, pemetaan data, penyesuaian sistem pelaporan, pembahasan hasil, hingga evaluasi akhir. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman pengurus terhadap pelaporan keuangan dan terbangunnya sistem pelaporan yang lebih tertib, akurat, serta sesuai standar akuntansi desa. Kesimpulan dari studi ini menegaskan bahwa pendampingan teknis dapat memperkuat tata kelola keuangan BUMDes, meningkatkan akuntabilitas, dan mendukung keberlanjutan usaha berbasis masyarakat. Model ini direkomendasikan sebagai acuan bagi pengembangan BUMDes lain di sektor serupa.

Kata kunci: BUMDes, Desa, Keuangan Desa, Tata Kelola Keuangan, Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat

Abstract

This article discusses the financial reporting assistance activity for BUMDes Badean, a Village-Owned Enterprise operating in the tourism sector in Badean Village, Jember Regency. The main issues faced include limited understanding of basic accounting principles among administrators and the suboptimal use of available financial applications. The approach used in this activity was a descriptive qualitative method, with primary data collected through interviews and observations, and secondary data obtained from village financial report documents. The assistance was carried out in stages, including introduction, data mapping, reporting system adjustment, result discussion, and final evaluation. The results of the activity showed a significant improvement in the administrators' understanding of financial reporting, as well as the development of a more orderly, accurate, and standard-compliant reporting system. The conclusion of this study emphasizes that technical assistance can strengthen BUMDes financial governance, improve accountability, and support the sustainability of community-based enterprises. This model is recommended as a reference for the development of other BUMDes in similar sectors.

Keywords: Village-Owned Enterprises (BUMDes), Village, Village Finance, Financial Governance, Assistance and Community Empowerment.

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, merupakan salah satu desa wisata potensial di lereng Gunung Argopuro. Letaknya yang strategis, sekitar 30–40 menit dari pusat Kota Jember, menjadikannya mudah diakses oleh wisatawan. Desa ini memiliki kekayaan lanskap alam serta nilai sejarah dari masa Kerajaan Majapahit yang tercermin dalam berbagai

situs kuno. Pemerintah desa mengarahkan pengembangannya pada konsep pariwisata berkelanjutan yang mengutamakan pelestarian lingkungan, budaya lokal, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pengelolaan potensi pariwisata di Desa Badean dilakukan oleh Pokdarwis Karang Pakel Bersatu yang berada di bawah naungan BUMDes Badean. Kawasan wisata andalan seperti Badean Rice Terrace, wahana river tubing, wisata kopi Arabika, dan agrowisata buah menjadi sumber utama pendapatan desa. Selain itu, sektor kuliner lokal juga dikembangkan sebagai bagian dari daya tarik wisata.

Namun, di tengah perkembangan ini, tantangan dalam tata kelola keuangan BUMDes masih menjadi persoalan yang signifikan. Meskipun telah tersedia aplikasi pencatatan keuangan, pemanfaatannya belum optimal. Struktur data, format laporan, dan pemahaman pengurus terhadap prinsip akuntansi masih menjadi hambatan dalam menciptakan pelaporan yang tertib dan akuntabel. Sistem keuangan yang belum tertata rapi berisiko menghambat transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan usaha secara strategis.

Solusi Permasalahan

Untuk menjawab tantangan tersebut, dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis pendampingan langsung (*experiential learning*) yang berfokus pada penguatan tata kelola keuangan BUMDes. Pendekatan ini melibatkan kombinasi antara edukasi partisipatif, pelatihan teknis, serta penyesuaian sistem pencatatan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan standar akuntansi desa.

Kegiatan pendampingan dilaksanakan selama lima minggu melalui beberapa tahapan strategis yang dimulai dengan pengenalan tim pendamping dan ruang lingkup kegiatan kepada pengurus BUMDes. Selanjutnya dilakukan pendampingan intensif dan pemetaan data kelembagaan serta keuangan yang ada. Setelah itu, tim melakukan penyesuaian terhadap aplikasi keuangan yang telah digunakan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan standar akuntansi yang relevan. Hasil penyesuaian kemudian dibahas bersama dalam forum yang melibatkan seluruh pengurus BUMDes untuk memastikan pemahaman bersama. Tahapan terakhir adalah evaluasi terhadap implementasi sistem yang telah diperbarui serta pengamatan terhadap dampaknya dalam memperkuat tata kelola keuangan BUMDes secara menyeluruh.

Melalui model pendampingan ini, diharapkan BUMDes Badean tidak hanya mampu menyusun laporan keuangan yang sesuai standar, tetapi juga menciptakan sistem tata kelola keuangan yang berkelanjutan, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan praktik ini diharapkan dapat menjadi contoh replikasi bagi BUMDes lain di sektor serupa.

METODOLOGI

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian ini dirancang untuk mendukung peningkatan kualitas keuangan BUMDes melalui pendekatan edukatif dan praktis. Kegiatan ini mengacu pada metode pendampingan berbasis praktik langsung (*experiential learning*) yang dikombinasikan dengan diskusi partisipatif, pendampingan teknis, serta evaluasi hasil implementasi aplikasi pencatatan keuangan BUMDes.

Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Lokasi tersebut merupakan salah satu desa yang memiliki BUMDes pariwisata yang maju sehingga diharapkan pertanggungjawaban keuangannya tercatat secara sistematis dan sesuai dengan standar. Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama lima minggu.

Subjek dan Populasi Sasaran

Subjek kegiatan ini terdiri atas BUMDes yang bergerak di sektor pariwisata. Populasi sasaran pada penelitian ini yaitu perangkat desa dan pengurus BUMDes

Tahapan Kegiatan

1. Pengenalan

Tahapan awal dimulai dengan pengenalan tim Project Based Learning (PBL) kepada perangkat desa dan pengurus BUMDes, sekaligus penyampaian tujuan, manfaat, serta ruang lingkup kegiatan.

2. Pendampingan

Proses pendampingan difokuskan pada pengumpulan dan pemetaan data yang berkaitan dengan kondisi keuangan serta profil kelembagaan BUMDes Badean.

3. Penyesuaian Aplikasi Keuangan

Aplikasi yang digunakan oleh BUMDes Badean dievaluasi dan diselaraskan dengan sistem atau template yang telah disiapkan oleh tim PBL.

4. Pembahasan

yang diwujudkan dalam bentuk presentasi hasil penyesuaian sistem keuangan yang telah dilakukan.

5. Evaluasi

Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap peningkatan pemahaman dan keterampilan pengurus dalam menyusun laporan keuangan, sejauh mana sistem yang baru diterapkan dengan baik, serta dampaknya terhadap tata kelola keuangan BUMDes secara umum

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil BUMDes Badean

Desa Wisata Badean terletak di Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dan berada di kawasan lereng Gunung Argopuro. Letaknya yang strategis, sekitar 30–40 menit dari pusat Kota Jember, menjadikannya mudah diakses oleh wisatawan. Selain memiliki lanskap alam yang indah, desa ini juga menyimpan nilai sejarah dari masa Kerajaan Majapahit yang tercermin dalam berbagai situs kuno yang ditemukan di wilayah tersebut. Pengembangan desa ini diarahkan pada konsep pariwisata berkelanjutan yang menitikberatkan pada pelestarian lingkungan, pelestarian budaya lokal, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Konsep ini memungkinkan masyarakat berperan aktif sebagai pelaku utama pariwisata dan sekaligus penerima manfaatnya.

Keunggulan utama Desa Badean terletak pada kekayaan daya tarik wisata yang dikelola berbasis potensi lokal. Destinasi andalannya adalah *Badean Rice Terrace*, yaitu sawah berundak yang kerap disandingkan dengan panorama Ubud, Bali. Selain itu, terdapat wahana *river tubing* di aliran sungai pegunungan, wisata kopi Arabika di ketinggian 1.000–1.400 mdpl, serta agrowisata buah-buahan seperti durian dan jeruk. Kegiatan peternakan dan budidaya ikan air tawar juga dikembangkan sebagai bentuk eduwisata. Dari sisi kuliner, masyarakat mengolah bahan pangan lokal menjadi makanan khas seperti *sambal lucu* dan *nasi gulung*, yang sekaligus menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Untuk mengelola potensi tersebut secara terorganisir, dibentuklah Pokdarwis Karang Pakel Bersatu pada tahun 2018, yang berada di bawah naungan BUMDes Badean. Pokdarwis ini memiliki peran penting dalam pelatihan masyarakat, pengembangan fasilitas wisata, dan promosi destinasi secara digital maupun konvensional. Salah satu kawasan yang dikelola secara intensif adalah Puncak Badean, yang menawarkan fasilitas wisata seperti area camping, kolam renang, penyewaan ATV, kafe, serta sarana pendukung seperti musholla, gazebo, dan stand UMKM. Produk lokal seperti kopi Puncak Badean dan sambal lucu dipasarkan sebagai oleh-oleh khas, memperkuat identitas desa sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi antara BUMDes dan Pokdarwis menjadi kekuatan utama dalam menjadikan Badean sebagai model desa wisata berbasis masyarakat di Jember.

Hasil Pendampingan Laporan Keuangan BUMDes

Pengenalan Tim dan Penyampaian Tujuan

Tahap awal dari kegiatan pendampingan difokuskan pada pengenalan tim Project Based Learning (PBL) kepada perangkat desa dan pengurus BUMDes Badean. Langkah ini tidak hanya

bersifat formalitas awal, melainkan menjadi fondasi penting dalam membangun hubungan kerja yang kolaboratif dan produktif. Melalui pertemuan ini, tim PBL menjelaskan secara komprehensif mengenai tujuan, manfaat, serta ruang lingkup kegiatan pendampingan yang akan dilaksanakan. Agar pengurus BUMDes dapat mengikuti alur pembelajaran dengan baik dan terstruktur.

Tujuan utama dari pendampingan ini adalah memperkuat tata kelola keuangan BUMDes melalui penyusunan laporan keuangan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Hal ini penting mengingat BUMDes Badean memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi lokal, khususnya dalam sektor pariwisata berbasis masyarakat. Namun, dalam praktik pengelolaannya, BUMDes masih menghadapi tantangan terkait keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami prinsip dasar akuntansi dan pengelolaan keuangan.

Meskipun BUMDes Badean telah memiliki aplikasi pencatatan keuangan, pemanfaatannya masih jauh dari optimal. Struktur data dan format laporan belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi desa yang berlaku. Ketidaksiuaian tersebut menghambat proses pelaporan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dalam tahap pengenalan ini, tim PBL juga menyampaikan rencana teknis pendampingan yang mencakup penyesuaian sistem aplikasi, pelatihan teknis, serta evaluasi implementasi secara bertahap.

Komunikasi dua arah yang terjadi pada sesi pengenalan ini juga berperan dalam menyamakan persepsi semua pihak terkait pentingnya sistem keuangan yang baik dalam mendukung keberlanjutan usaha desa. Antusiasme dari pihak perangkat desa dan pengurus BUMDes menunjukkan adanya komitmen untuk terlibat aktif dalam proses pendampingan. Dengan terciptanya pemahaman awal yang solid, tahapan ini menjadi landasan bagi keterlibatan aktif dan rasa tanggung jawab bersama selama keseluruhan proses pendampingan berlangsung.

Pendampingan dan Pemetaan Data

Tahapan kedua dalam kegiatan pendampingan diarahkan pada pengumpulan dan pemetaan data sebagai landasan dalam proses restrukturisasi sistem pencatatan keuangan BUMDes Badean. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pendekatan observatif dan partisipatif, dengan metode utama berupa studi dokumen, wawancara terstruktur, dan observasi lapangan.

Data yang dihimpun meliputi dokumen pencatatan transaksi harian, laporan keuangan sebelumnya, serta struktur dan cara kerja aplikasi pencatatan keuangan yang telah digunakan oleh BUMDes. Di samping aspek keuangan, dilakukan pula pendataan terhadap elemen kelembagaan BUMDes, antara lain struktur organisasi, unit-unit usaha yang aktif, dan tingkat pemahaman pengurus terhadap fungsi keuangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi aktual operasional BUMDes secara administratif maupun teknis.

Melalui analisis terhadap data yang diperoleh, ditemukan berbagai kendala yang menghambat efektivitas tata kelola keuangan BUMDes. Beberapa temuan utama antara lain adalah tidak sinkronnya struktur akun dalam aplikasi dengan aktivitas transaksi nyata, format laporan yang belum sesuai standar akuntansi desa, serta absennya prosedur baku dalam pencatatan harian. Di sisi lain, pengurus BUMDes cenderung mengandalkan pencatatan manual sebagai pelengkap, yang justru memperbesar potensi duplikasi atau ketidaktepatan data keuangan.

Hasil pemetaan ini kemudian menjadi dasar bagi perancangan intervensi teknis yang lebih terarah pada tahap berikutnya, yaitu penyesuaian sistem dan pelatihan penggunaan aplikasi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan riil. Tahapan ini menunjukkan bahwa diagnosis awal yang akurat terhadap kelemahan struktural dan kapasitas SDM merupakan syarat penting untuk menghasilkan model pendampingan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Selanjutnya, tahap ketiga berfokus pada penyesuaian aplikasi keuangan. Aplikasi yang digunakan oleh BUMDes Badean dievaluasi dan diselaraskan dengan sistem atau template yang telah disiapkan oleh tim PBL. Penyesuaian dilakukan terhadap komponen-komponen penting seperti daftar akun, buku kas, laporan arus kas, laporan laba-rugi, dan neraca. Tujuan dari tahap ini adalah menciptakan sistem pelaporan yang tidak hanya sesuai dengan standar akuntansi desa, tetapi juga mudah dipahami dan digunakan oleh pengurus.

Penyesuaian Aplikasi Keuangan

Tahap ketiga dari rangkaian pendampingan difokuskan pada penyesuaian aplikasi keuangan yang telah dimiliki oleh BUMDes Badean. Berdasarkan hasil pemetaan sebelumnya, aplikasi yang digunakan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan riil BUMDes, baik dari sisi struktur akun, format laporan, maupun keterpahaman pengguna. Oleh karena itu, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem aplikasi yang ada, kemudian disesuaikan dengan template standar yang telah disusun oleh tim Project Based Learning (PBL).

Penyesuaian sistem dilakukan terhadap komponen-komponen kunci dalam penyusunan laporan keuangan, meliputi daftar akun (chart of accounts), buku kas, laporan arus kas, laporan laba-rugi, dan neraca. Daftar akun dirancang ulang agar mencerminkan aktivitas usaha yang spesifik pada unit-unit usaha pariwisata yang dijalankan oleh BUMDes Badean. Begitu pula format laporan keuangan disesuaikan agar sejalan dengan prinsip akuntansi desa dan mudah digunakan oleh pengurus yang tidak memiliki latar belakang akuntansi formal.

Pendekatan yang digunakan dalam penyesuaian ini tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis akuntansi, tetapi juga aspek kebermanfaatan praktis bagi pengurus. Aplikasi dirancang agar bersifat user-friendly, dengan navigasi dan fitur yang sederhana, sehingga dapat digunakan secara mandiri oleh pengurus BUMDes dalam kegiatan operasional sehari-hari. Proses ini dilengkapi dengan pelatihan langsung dan simulasi penggunaan sistem, sebagai bagian dari strategi peningkatan kapasitas SDM secara aplikatif.

Tujuan utama dari tahap ini adalah menciptakan sistem pelaporan yang sesuai standar, namun tetap relevan dengan kemampuan dan kebutuhan lokal. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan laporan keuangan BUMDes dapat disusun secara lebih tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pemangku kepentingan desa maupun pihak eksternal. Penyesuaian aplikasi juga menjadi langkah krusial dalam membangun sistem keuangan yang berorientasi pada transparansi, efisiensi, dan keberlanjutan tata kelola usaha desa.

Presentasi dan Pembahasan Sistem Baru

Tahapan keempat dalam proses pendampingan difokuskan pada penyampaian dan pembahasan hasil penyesuaian sistem keuangan BUMDes Badean. Kegiatan ini diwujudkan melalui forum presentasi yang melibatkan perangkat desa dan seluruh jajaran pengurus BUMDes sebagai bentuk transparansi dan validasi terhadap sistem keuangan yang telah dikembangkan. Tim pendamping memfasilitasi sesi ini secara partisipatif, dengan tujuan tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga mendorong diskusi terbuka dan keterlibatan aktif dari pihak pengelola.

Dalam forum ini, ditampilkan hasil penyesuaian aplikasi keuangan, termasuk struktur akun yang telah diperbaiki serta contoh laporan keuangan utama seperti laporan arus kas, laporan laba-rugi, dan neraca. Materi disusun secara sederhana dan aplikatif agar mudah dipahami oleh pengurus BUMDes yang memiliki latar belakang non-akuntansi. Selain itu, dijelaskan pula alur pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan secara otomatis oleh sistem, guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai fungsionalitas aplikasi yang telah disesuaikan.

Forum diskusi ini juga menjadi ruang musyawarah untuk menyempurnakan format dan isi laporan sebelum sistem diterapkan secara penuh. Pengurus BUMDes diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, mengungkapkan hambatan selama proses pencatatan, serta menyampaikan saran terhadap fitur-fitur dalam aplikasi. Partisipasi aktif ini menciptakan atmosfer pembelajaran dua arah yang efektif, sekaligus memperkuat rasa kepemilikan pengurus terhadap sistem pelaporan yang akan digunakan secara berkelanjutan.

Melalui mekanisme ini, tercipta pemahaman yang lebih mendalam dari pihak pengelola terhadap prinsip kerja sistem keuangan baru. Diskusi yang konstruktif juga memungkinkan tim pendamping untuk menangkap dinamika operasional yang belum terakomodasi dalam penyesuaian sebelumnya. Dengan demikian, sesi pembahasan ini tidak hanya berfungsi sebagai

sarana validasi, tetapi juga sebagai momentum strategis untuk mengintegrasikan pengalaman lapangan ke dalam penyempurnaan sistem secara menyeluruh.

Evaluasi Implementasi dan Dampaknya

Tahap terakhir dari proses pendampingan difokuskan pada evaluasi implementasi sistem keuangan yang telah disesuaikan serta dampaknya terhadap penguatan tata kelola BUMDes Badean secara menyeluruh. Evaluasi ini dilakukan melalui kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif, termasuk observasi langsung, wawancara mendalam dengan pengurus, serta penyebaran kuesioner untuk mengukur tingkat pemahaman dan keterampilan teknis dalam menyusun laporan keuangan.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman pengurus terhadap proses pencatatan transaksi, pengelompokan akun, serta penyusunan laporan keuangan dasar seperti laporan arus kas, laba-rugi, dan neraca. Para pengurus juga mampu menggunakan aplikasi yang telah disesuaikan secara mandiri, dengan tingkat kesalahan input data yang jauh lebih rendah dibandingkan sebelum pendampingan dilakukan. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem yang baru telah diimplementasikan dengan cukup baik dan dapat dioperasikan sesuai dengan tujuan awal pendampingan.

Secara kelembagaan, proses pendampingan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan BUMDes. Penggunaan aplikasi yang terstruktur mendorong terwujudnya transparansi dalam setiap aktivitas keuangan, memperjelas alur pertanggungjawaban, dan mempermudah proses pelaporan kepada pemangku kepentingan desa. Selain itu, dokumentasi transaksi dan laporan keuangan menjadi lebih tertib dan siap untuk diaudit secara internal maupun eksternal.

Dampak lainnya adalah tumbuhnya kesadaran di kalangan pengurus akan pentingnya tata kelola keuangan yang akuntabel dan berkelanjutan sebagai fondasi untuk pengembangan unit usaha BUMDes ke depan. Pengurus mulai melihat sistem pelaporan bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai alat strategis dalam pengambilan keputusan dan perencanaan usaha jangka panjang.

Secara keseluruhan, tahapan pendampingan yang diterapkan telah membuktikan efektivitasnya dalam membangun sistem keuangan yang tertib dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Model pendampingan berbasis pelibatan langsung, penyesuaian sistem, dan penguatan kapasitas SDM ini dapat direplikasi di BUMDes lain, terutama yang bergerak di sektor pariwisata atau mengelola unit usaha desa dengan potensi pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan di BUMDes Badean dapat menjadi contoh praktik baik (best practice) dalam upaya mendorong tata kelola usaha desa yang profesional dan berkelanjutan.



(a)



(b)



(c)



(d)

*Tahapan (a) Pengenalan (b) Pengumpulan Data (c) Penyesuaian (d) Presentasi***KESIMPULAN**

Pendampingan penyusunan laporan keuangan pada BUMDes Badean menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas tata kelola keuangan sangat penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan usaha desa, khususnya di sektor pariwisata. Melalui pendekatan bertahap—dimulai dari pengenalan, pengumpulan data, penyesuaian aplikasi, pembahasan hasil, hingga evaluasi—BUMDes Badean mampu memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan keuangannya. Pendampingan ini tidak hanya membantu menciptakan laporan yang lebih akurat dan sesuai standar akuntansi desa, tetapi juga meningkatkan pemahaman serta keterlibatan aktif pengurus BUMDes dalam proses administrasi keuangan. Hasil akhir menunjukkan bahwa tata kelola keuangan BUMDes menjadi lebih transparan, akuntabel, dan siap untuk mendukung keberlanjutan usaha wisata berbasis masyarakat. Dengan keberhasilan ini, model pendampingan yang diterapkan dapat menjadi acuan untuk pengembangan BUMDes lain di berbagai sektor ekonomi desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Kemendagri. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2015). Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, serta Pembubaran BUMDes. Jakarta.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. ALFABETA.